

Penguatan Digital Citizenship Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Moderasi Beragama pada Generasi Z

Farida Catur Wahyu Anggriyani

STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

*e-mail korespondensi; faridabasmin@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi, komunikasi, dan partisipasi sosial Generasi Z dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses informasi dan ruang partisipasi yang lebih luas, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, pelanggaran etika digital, dan rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penguatan *digital citizenship* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peran guru PPKn dalam membentuk warga negara digital berkarakter Pancasila, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di MI Al Munawwir Sangatta Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru PPKn, guru bimbingan dan konseling, serta peserta didik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan *digital citizenship* diimplementasikan melalui pengembangan literasi digital, etika digital, tanggung jawab digital, dan partisipasi digital yang terintegrasi dalam pembelajaran PPKn. Guru PPKn berperan sebagai fasilitator, pembimbing, teladan, dan penguat nilai-nilai Pancasila serta keislaman dalam kehidupan digital peserta didik. Faktor pendukung meliputi kultur sekolah yang religius, peran aktif guru, ketersediaan teknologi, serta integrasi nilai keislaman dan kebangsaan, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kemampuan verifikasi informasi, pengaruh negatif media sosial, keterbatasan pendampingan keluarga, dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara digital yang cerdas, beretika, bertanggung jawab, dan berkarakter Pancasila serta memiliki sikap moderasi beragama dalam menghadapi dinamika kehidupan di era digital.

Kata kunci: digital citizenship, PPKn, Generasi Z, literasi digital, warga negara digital. Moderasi beragama

Abstract

The development of digital technology has changed the patterns of interaction, communication, and social participation of Generation Z in everyday life. On the one hand, technological advances provide easier access to information and wider participation space, but on the other hand, they also give rise to various challenges such as the spread of hoaxes, cyberbullying, violations of digital ethics, and low awareness of digital responsibility. This study aims to analyze the implementation of digital citizenship strengthening through Pancasila and Citizenship Education (PPKn) learning, the role of PPKn teachers in shaping digital citizens with Pancasila character, as well as supporting and inhibiting factors for its implementation at MI Al Munawwir Sangatta Selatan. The study used a qualitative approach with a case study type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving the principal, PPKn teachers, guidance and counseling

teachers, and students. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña which includes data condensation, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The results of the study indicate that digital citizenship strengthening is implemented through the development of digital literacy, digital ethics, digital responsibility, and digital participation integrated into PPKn learning. Civics and Citizenship Education (PPKn) teachers act as facilitators, mentors, role models, and reinforcers of Pancasila and Islamic values in students' digital lives. Supporting factors include a religious school culture, the active role of teachers, the availability of technology, and the integration of Islamic and national values. Inhibiting factors include low information verification skills, the negative influence of social media, limited family support, and the rapid development of digital technology. This study confirms that Civics and Citizenship Education (PPKn) learning has a strategic role in shaping digital citizens who are intelligent, ethical, responsible, and have Pancasila character and have an attitude of religious moderation in facing the dynamics of life in the digital era.

Keywords: digital citizenship, PPKn, Generation Z, digital literacy, digital citizens. Religious moderation

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara individu belajar, berkomunikasi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan menjalankan peran sebagai warga negara. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta berbagai platform digital telah menciptakan ruang kewargaan baru yang memungkinkan warga negara berinteraksi tanpa batas geografis (Susi et al., 2025). Kemampuan menggunakan teknologi digital tidak lagi cukup dipahami sebagai keterampilan teknis semata, tetapi juga mencakup kesadaran etis, tanggung jawab sosial, kemampuan berpikir kritis, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis (Dikarsa, 2024; Sumiatun et al., 2026). Kondisi tersebut melahirkan konsep digital citizenship atau kewarganegaraan digital yang saat ini menjadi salah satu fokus penting dalam pendidikan abad ke-21 (Luhukay et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran moral dan tanggung jawab generasi muda dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab (Kale et al., 2025; Vitaharsa, 2026).

Perkembangan teknologi digital memiliki keterkaitan erat dengan karakteristik Generasi Z. Generasi ini merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang telah terkoneksi dengan internet sehingga sering disebut sebagai digital natives (Handayani & Fauzi, 2023). Mereka terbiasa memperoleh informasi secara cepat, menggunakan berbagai platform media sosial, serta menjadikan teknologi digital sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari (Fadillah et al., 2022). Karakteristik tersebut memberikan berbagai peluang positif, seperti kemudahan akses informasi, perluasan jejaring sosial, dan peningkatan kreativitas (Arbi & Amrullah, 2024). Namun di sisi lain, tingginya intensitas penggunaan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, cyberbullying, ujaran kebencian, pelanggaran privasi digital, serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Qutub, 2025). Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan digital peserta didik belum selalu diikuti dengan kematangan etis dan tanggung jawab sebagai warga negara digital.

Penggunaan internet oleh kelompok usia remaja di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peserta didik sekolah menengah menjadi salah satu kelompok pengguna internet terbesar yang memanfaatkan media digital untuk kegiatan belajar, komunikasi, hiburan, hingga aktivitas sosial (Nakhma'ussolikhah et al., 2025; Gerungan & Tatuhe, 2023). Penelitian mengenai pemanfaatan media

online pada peserta didik menunjukkan bahwa internet telah menjadi sumber utama dalam penyelesaian tugas pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Aini et al., 2024; Laoli et al., 2024; Kusumawati et al., 2025). Namun demikian, penggunaan media digital juga menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan media sosial, rendahnya tanggung jawab akademik, serta kurangnya kemampuan memilah informasi yang valid (Paramitasari et al., 2025; Putra, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi kewarganegaraan digital sebagai bagian dari proses pendidikan di sekolah.

Konsep digital citizenship merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara aman, etis, bertanggung jawab, dan produktif. Ribble & Bailey (2011) menjelaskan bahwa kewarganegaraan digital mencakup berbagai dimensi seperti literasi digital, komunikasi digital, etika digital, keamanan digital, hak dan tanggung jawab digital, serta partisipasi digital. Kewarganegaraan digital dalam konteks pendidikan, tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga warga negara yang memiliki kesadaran moral, kemampuan berpikir kritis, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dalam ruang digital (Kurniawan et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan digital citizenship berkontribusi terhadap peningkatan etika digital, kesadaran hukum, literasi politik, dan partisipasi sosial generasi muda (Imelda et al., 2026).

Selain kompetensi kewarganegaraan digital, peserta didik juga memerlukan kemampuan untuk mengembangkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ruang digital. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keseimbangan, toleransi, keadilan, menghargai keberagaman, serta menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisme. Di era digital, arus informasi yang sangat cepat sering kali disertai dengan penyebaran konten yang mengandung intoleransi, ujaran kebencian, provokasi berbasis agama, hingga paham-paham keagamaan yang ekstrem. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara berpikir dan perilaku Generasi Z yang merupakan kelompok pengguna internet paling aktif. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan penting agar peserta didik mampu bersikap kritis terhadap informasi keagamaan yang diperoleh melalui media digital serta mampu membangun interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, anti kekerasan, penghormatan terhadap perbedaan, komitmen kebangsaan, dan penerimaan terhadap budaya lokal sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik tidak hanya dibekali kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan karakter yang menghargai keberagaman dan mampu menjaga persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, integrasi digital citizenship dan moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn menjadi strategi yang relevan untuk membentuk Generasi Z yang cerdas secara digital, berkarakter Pancasila, serta mampu menciptakan ruang digital yang damai, toleran, dan inklusif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan PPKn tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi juga keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Al Farizi et al., 2025). Ketiga dimensi tersebut perlu dikembangkan melalui pendekatan yang relevan dengan

realitas kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn tidak lagi cukup berorientasi pada penguasaan konsep-konsep kewarganegaraan konvensional, tetapi harus mampu merespons perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital. Pendidikan kewarganegaraan di era digital dituntut untuk mengintegrasikan literasi digital, etika digital, dan partisipasi digital sebagai bagian dari pembentukan warga negara abad ke-21 (Supriyanto, 2026).

Studi menunjukkan bahwa integrasi digital citizenship dalam pembelajaran PPKn menjadi salah satu arah baru pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan perlu direkonstruksi melalui integrasi etika digital, literasi digital, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penguatan nilai-nilai lokal dan nasional (Masyrofah, 2025; Pertiwi et al., 2025). Bahkan perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah mendorong munculnya model pendidikan kewarganegaraan baru yang menggabungkan kompetensi digital dengan nilai-nilai karakter kebangsaan (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2025; Sari et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, penguatan kewarganegaraan digital perlu tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dalam menghadapi dinamika masyarakat digital yang semakin kompleks.

SMA Al Munawwir Sangatta Selatan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada dalam konteks perkembangan masyarakat digital saat ini. Peserta didik yang mayoritas berasal dari Generasi Z memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan teknologi digital, baik untuk kebutuhan akademik maupun aktivitas sosial sehari-hari. Penggunaan telepon pintar, media sosial, aplikasi pembelajaran, serta berbagai platform digital telah menjadi bagian dari kehidupan peserta didik. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan tantangan dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Sebagai sekolah berbasis Islam, SMA Al Munawwir Sangatta Selatan memiliki potensi yang kuat dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter peserta didik. Penguatan digital citizenship di lingkungan sekolah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga menyangkut pembentukan etika, tanggung jawab, sikap toleransi, kejujuran, serta kesadaran moral dalam berinteraksi di ruang digital. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn menjadi instrumen strategis yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik.

Meskipun penelitian mengenai literasi digital, pendidikan kewarganegaraan digital, dan Generasi Z telah banyak dilakukan, kajian yang secara spesifik mengkaji penguatan digital citizenship melalui pembelajaran PPKn pada sekolah menengah berbasis Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek literasi digital, partisipasi politik digital, atau pendidikan kewarganegaraan secara umum. Sementara itu, penelitian yang mengintegrasikan dimensi digital citizenship, nilai-nilai Pancasila, karakter keislaman, dan pembelajaran PPKn dalam konteks sekolah menengah atas belum banyak ditemukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan digital citizenship melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Generasi Z di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi pembelajaran PPKn dalam membangun kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik, peran guru dalam proses penguatan digital citizenship, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis

terhadap pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah dalam membentuk warga negara digital yang berkarakter Pancasila dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada penguatan kompetensi kewarganegaraan digital peserta didik, tetapi juga pada bagaimana pembelajaran PPKn dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sehingga peserta didik mampu menunjukkan sikap toleran, menghargai keberagaman, serta bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses penguatan *digital citizenship* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Generasi Z di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembelajaran, peran guru, serta dinamika yang terjadi dalam penguatan kewarganegaraan digital di lingkungan sekolah.

Penelitian dilaksanakan di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta didik di sekolah tersebut didominasi oleh Generasi Z yang memiliki intensitas penggunaan teknologi digital yang tinggi dalam aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, SMA Al Munawwir sebagai sekolah berbasis Islam memiliki karakteristik yang menarik untuk dikaji dalam konteks integrasi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Pancasila, dan kewarganegaraan digital, dan nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, serta penghargaan terhadap keberagaman.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Informan pendukung meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru bimbingan dan konseling, serta peserta didik kelas X, XI, dan XII yang aktif mengikuti pembelajaran PPKn.

Tabel 1; Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1
2	Guru PPKn	1
3	Waka Kurikulum	1
4	Guru BK	1
5	Siswa Kelas X	3
6	Siswa Kelas XI	3
7	Siswa Kelas XII	3
Total		13

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Khoa et al., 2023). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran PPKn yang berkaitan dengan penguatan *digital citizenship*, termasuk interaksi guru dan peserta didik, penggunaan media digital, sikap toleransi dalam diskusi, serta perilaku peserta didik dalam merespons perbedaan pandangan di ruang digital serta implementasi nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai

pemahaman, pengalaman, strategi pembelajaran, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penguatan *digital citizenship* dan moderasi beragama. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui analisis perangkat pembelajaran, modul ajar, bahan presentasi, tata tertib sekolah, program literasi digital, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan.

Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi utama *digital citizenship*, yaitu: (1) literasi digital (*digital literacy*), yang mencakup kemampuan peserta didik dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis; (2) etika digital (*digital ethics*), yang berkaitan dengan perilaku dan norma dalam berinteraksi di ruang digital; (3) tanggung jawab digital (*digital responsibility*), yang mencakup kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan konsekuensi penggunaan teknologi digital; serta (4) partisipasi digital (*digital participation*), yang berkaitan dengan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas sosial dan kewarganegaraan melalui media digital, serta (5) moderasi beragama, yang mencakup sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan kemampuan menyikapi informasi keagamaan di media digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan *member checking* untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi data dengan informasi yang disampaikan oleh informan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan tabel tematik untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pada tahap analisis data, peneliti juga mengidentifikasi pola-pola integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn, khususnya dalam penguatan etika digital, pencegahan ujaran kebencian, penyaringan informasi keagamaan yang beredar di media sosial, serta pengembangan sikap toleran dan inklusif di ruang digital.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu memperoleh persetujuan dari pihak sekolah dan informan, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta menggunakan data penelitian hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penguatan Digital Citizenship melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan *digital citizenship* di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan dilaksanakan melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan digital ke dalam materi PPKn, seperti hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, kebebasan berpendapat, dan nilai-nilai Pancasila. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital tidak diposisikan sebagai materi tambahan, melainkan menjadi bagian integral dari pembelajaran kewarganegaraan. Pendekatan tersebut sesuai dengan pandangan Ribble (2012) yang menekankan bahwa *digital citizenship* perlu dikembangkan melalui

pengalaman belajar yang terintegrasi dalam kurikulum. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Vallès-Peris & Domènech, 2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan kewarganegaraan digital akan lebih efektif ketika dihubungkan dengan konteks kehidupan sosial dan kewarganegaraan peserta didik. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai digital citizenship dalam pembelajaran PPKn menjadi strategi yang relevan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan digital.

Selain itu, penguatan digital citizenship juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan moderasi beragama. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dibimbing untuk menggunakan media digital secara bijak, menghargai keberagaman keyakinan, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan konten yang dapat memicu intoleransi. Nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, sikap adil, menghormati perbedaan, dan komitmen kebangsaan dapat diinternalisasikan melalui praktik kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan digital citizenship tidak hanya membentuk warga negara digital yang cakap dan beretika, tetapi juga mendukung terbentuknya generasi yang moderat dalam beragama, mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk, serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Guru PPKn memanfaatkan berbagai media digital seperti video pembelajaran, artikel daring, portal berita, dan platform pembelajaran digital sebagai sumber belajar. Peserta didik juga diarahkan untuk membandingkan berbagai sumber informasi guna mengidentifikasi validitas dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Temuan ini menunjukkan adanya penguatan dimensi digital literacy, khususnya kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital. Menurut Tinmaz et al. (2022), literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi secara kritis. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Koda & Suharno (2025) yang menyatakan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku kewarganegaraan digital Generasi Z. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Nurmansyah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa aktivitas analisis sumber informasi dalam pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi yang valid dan menghindari disinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital menjadi fondasi utama dalam pembentukan warga negara digital yang cerdas dan kritis.

Dalam konteks moderasi beragama, kemampuan literasi digital tersebut sangat penting untuk membantu peserta didik menyaring berbagai informasi keagamaan yang beredar di ruang digital. Peserta didik dapat belajar membedakan informasi yang mengandung nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan semangat persatuan dengan informasi yang bersifat provokatif, intoleran, atau mengandung ujaran kebencian. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik didorong untuk mengembangkan sikap kritis, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham ekstrem maupun berita hoaks yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keagamaan. Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya mendukung terbentuknya kewarganegaraan digital yang baik, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi, anti-kekerasan, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen kebangsaan.

Penguatan digital citizenship juga dilakukan melalui penanaman etika digital. Guru secara konsisten mengaitkan materi HAM, demokrasi, dan kebebasan berpendapat dengan perilaku peserta didik dalam menggunakan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai moral dalam ruang digital. Menurut Alaby (2026), etika digital merupakan salah satu elemen penting digital citizenship yang mengarahkan individu

untuk berinteraksi secara bertanggung jawab di lingkungan digital. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian (Anggraheni et al., 2026) yang menemukan bahwa penguatan refleksi kewarganegaraan digital dalam pembelajaran mampu meningkatkan kesadaran etis peserta didik dalam bermedia sosial. Penelitian Mas'ud et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kesadaran etika digital memiliki hubungan positif dengan perilaku penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penanaman etika digital menjadi instrumen penting dalam mencegah perilaku negatif seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks.

Dalam perspektif moderasi beragama, penanaman etika digital tersebut turut mendukung pengembangan nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi (*tasamuh*), sikap adil (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dibimbing untuk menggunakan kebebasan berpendapat secara bijaksana tanpa merendahkan keyakinan atau identitas kelompok lain. Kesadaran ini penting mengingat media digital sering menjadi ruang munculnya intoleransi, ujaran kebencian berbasis agama, serta penyebaran informasi yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penguatan etika digital tidak hanya membentuk warga digital yang bertanggung jawab, tetapi juga mendukung terbentuknya peserta didik yang moderat dalam beragama, mampu menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan menciptakan interaksi yang damai di ruang digital maupun kehidupan nyata.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah memahami pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial. Kesadaran tersebut berkembang melalui pembiasaan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran dan penguatan budaya sekolah. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial Aldridge (2023) yang menyatakan bahwa perilaku individu terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan sosial. Guru berperan sebagai model yang memberikan contoh penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian Webster (2025) yang menemukan bahwa lingkungan pendidikan yang secara konsisten menanamkan norma digital positif berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku kewarganegaraan digital peserta didik.

Dalam perspektif moderasi beragama, pemahaman etika bermedia sosial tersebut menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi, menghormati perbedaan, anti-kekerasan, dan sikap adil dalam berinteraksi di ruang digital. Peserta didik yang terbiasa menggunakan media sosial secara bijak cenderung lebih mampu menyaring informasi yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, maupun konten yang berpotensi menimbulkan konflik antarumat beragama. Melalui pembelajaran dan keteladanan guru, peserta didik didorong untuk mengedepankan sikap saling menghargai serta menjaga kerukunan dalam komunikasi digital. Dengan demikian, penguatan etika digital tidak hanya mendukung terbentuknya digital citizenship, tetapi juga berkontribusi dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama sehingga peserta didik mampu menjadi warga digital yang bertanggung jawab, toleran, dan menjunjung tinggi keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi digital citizenship juga terlihat pada penguatan tanggung jawab digital. Guru memberikan pemahaman mengenai privasi digital, hak cipta, penggunaan teknologi secara bijak, serta konsekuensi hukum aktivitas digital melalui pembahasan UU ITE. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta didik mulai memahami bahwa ruang digital tidak terlepas dari norma dan aturan hukum yang berlaku. Menurut Ribble (2012), tanggung jawab digital mencakup kesadaran terhadap hak, kewajiban, keamanan, dan dampak penggunaan teknologi. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Ayang Afira Anugerahayu et al. (2026) yang menunjukkan bahwa literasi hukum digital berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran peserta didik dalam menggunakan media digital secara

bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman hukum digital menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter warga negara digital yang taat aturan.

Aspek lain yang ditemukan dalam penelitian adalah penguatan partisipasi digital. Guru mendorong peserta didik untuk berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan dan menyampaikan pendapat melalui berbagai platform digital. Temuan ini menunjukkan bahwa media digital dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan partisipasi kewarganegaraan peserta didik. Park et al. (2023) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu mendorong lahirnya warga negara yang aktif dan partisipatif. Sejalan dengan itu, Zhong & Zheng (2023) menegaskan bahwa partisipasi digital merupakan salah satu indikator utama kewarganegaraan digital yang demokratis. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Kahne, Lee, dan Feezell (2012) yang menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam aktivitas digital yang bersifat diskursif berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi sipil dan politik mereka (Römer, 2024). Oleh karena itu, partisipasi digital dalam pembelajaran PPKn dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi pendidikan demokrasi di era digital.

Dalam konteks moderasi beragama, partisipasi digital juga berperan penting dalam membentuk sikap toleran, menghargai perbedaan, dan mendorong dialog yang konstruktif antarindividu dengan latar belakang agama yang beragam. Melalui diskusi digital yang sehat, peserta didik belajar menyampaikan pendapat secara santun, menghindari ujaran kebencian, serta memverifikasi informasi keagamaan sebelum menyebarkannya. Kemampuan ini sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, penguatan partisipasi digital dalam pembelajaran PPKn tidak hanya mendukung terbentuknya warga negara yang aktif dan demokratis, tetapi juga berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama guna menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat yang multikultural.

Karakteristik SMA Al Munawwir sebagai sekolah berbasis Islam turut memperkuat implementasi digital citizenship melalui internalisasi nilai kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), toleransi (*tasāmuh*), dan penghormatan terhadap sesama. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kewarganegaraan digital tidak hanya didasarkan pada kerangka normatif Pancasila, tetapi juga diperkuat oleh nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam budaya sekolah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Saputra, 2024; Qowim et al., 2024; Salisah et al., 2024) yang menemukan bahwa integrasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan berkontribusi terhadap pembentukan perilaku digital yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sinergi antara nilai Pancasila, nilai keislaman, dan prinsip-prinsip moderasi beragama menjadi faktor penting dalam membentuk karakter warga negara digital yang berintegritas, toleran, serta mampu berpartisipasi secara positif dalam masyarakat multikultural.

Peran Guru PPKn dalam Membentuk Warga Negara Digital Berkarakter Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn berperan sebagai fasilitator literasi digital dengan membimbing peserta didik mengakses, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber digital. Temuan ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Menurut Gilster & Glister (1997), literasi digital mencakup kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis, bukan sekadar kemampuan mengakses teknologi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Supriyanto (2026) yang menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku *digital citizenship*, serta penelitian Aliyah et al. (2025) yang menemukan

bahwa aktivitas verifikasi informasi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menghadapi arus informasi digital.

kemampuan literasi digital dan berpikir kritis tersebut menjadi modal penting bagi peserta didik untuk menyikapi berbagai informasi keagamaan yang beredar di media digital secara bijaksana dan proporsional. Peserta didik dilatih untuk tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, atau provokasi yang dapat memicu konflik sosial dan keagamaan. Melalui proses verifikasi informasi, peserta didik belajar menerapkan nilai-nilai moderasi beragama seperti *tawassuth* (jalan tengah), *tasāmuḥ* (toleransi), *i'tidal* (adil), dan *musawah* (kesetaraan) dalam berinteraksi di ruang digital. Dengan demikian, penguatan literasi digital dalam pembelajaran PPKn tidak hanya mendukung terbentuknya warga negara digital yang cerdas dan bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat karakter peserta didik yang moderat, menghargai keberagaman, serta mampu menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di era digital.

1. Guru sebagai Fasilitator Literasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn berperan sebagai fasilitator literasi digital dengan membimbing peserta didik mengakses, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber digital. Temuan ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Menurut Gilster (1997), literasi digital mencakup kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis, bukan sekadar kemampuan mengakses teknologi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Koda & Suharno (2025) yang menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi signifikan terhadap pembentukan perilaku *digital citizenship*, serta penelitian Hibbatul Aliyah et al. (2025) yang menemukan bahwa aktivitas verifikasi informasi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menghadapi arus informasi digital.

Kemampuan literasi digital tersebut sangat penting untuk membantu peserta didik menyaring informasi keagamaan yang beredar di media digital, menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi intoleran yang dapat memicu konflik sosial. Melalui bimbingan guru PPKn, peserta didik dapat mengembangkan sikap kritis, toleran, serta menghargai keberagaman agama dan keyakinan, yang merupakan nilai-nilai utama moderasi beragama. Dengan demikian, penguatan literasi digital tidak hanya mendukung terbentuknya warga digital yang bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang moderat, inklusif, dan mampu menjaga kerukunan dalam masyarakat multikultural.

2. Guru sebagai Pembina Etika Digital

Guru PPKn juga berperan sebagai pembina etika digital melalui penguatan nilai kesantunan, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn menjadi sarana internalisasi norma dan nilai moral dalam kehidupan digital. Dalam kerangka *digital citizenship*, Ribble & Park (2019) menempatkan *digital etiquette* sebagai elemen penting yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi di ruang digital. Hasil penelitian ini mendukung temuan Febrianti et al. (2026) yang menyatakan bahwa integrasi etika digital dalam pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran peserta didik untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan menghindari perilaku negatif seperti *cyberbullying* maupun penyebaran hoaks.

3. Guru sebagai Teladan Warga Negara Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menjadi figur teladan dalam penggunaan teknologi digital melalui komunikasi yang profesional, penyampaian informasi yang akurat, dan penghormatan terhadap privasi peserta didik. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan *digital citizenship* tidak hanya berlangsung

melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui proses keteladanan. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Bandura, 2024) yang menjelaskan bahwa individu belajar melalui observasi terhadap perilaku model yang dianggap memiliki otoritas. Temuan ini juga didukung oleh Brandau et al. (2022) yang menemukan bahwa keteladanan dan budaya digital positif di lingkungan sekolah berpengaruh terhadap perkembangan perilaku kewarganegaraan digital peserta didik.

keteladanan guru dalam ruang digital menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, anti-kekerasan, penghargaan terhadap keberagaman, serta sikap bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan. Melalui perilaku digital yang santun, bertanggung jawab, dan tidak menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian maupun intoleransi, guru memberikan contoh nyata kepada peserta didik tentang bagaimana berinteraksi secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, penguatan *digital citizenship* yang dilakukan melalui keteladanan guru tidak hanya membentuk warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab, tetapi juga mendukung internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sehingga peserta didik mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat persatuan, kerukunan, dan kehidupan yang damai dalam keberagaman.

4. Guru sebagai Motivator Partisipasi Digital Positif

Guru PPKn berperan sebagai motivator yang mendorong peserta didik memanfaatkan media digital untuk kegiatan yang produktif, edukatif, dan bernilai sosial. Peserta didik didorong untuk mengikuti diskusi daring, mengakses informasi kebangsaan, dan menghasilkan konten yang bermanfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa guru berupaya mengembangkan dimensi *digital participation* dalam pembelajaran. Menurut (Westheimer & Ladson-Billings, 2024), pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu membentuk warga negara yang aktif dan partisipatif dalam kehidupan publik. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rahmelia et al. (2026) yang menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik dalam aktivitas digital yang bersifat partisipatif berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan kewargaan mereka.

5. Guru sebagai Penguat Nilai-Nilai Pancasila dan Keislaman di Ruang Digital

Karakteristik SMA Al Munawwir sebagai sekolah berbasis Islam memperkuat peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan keislaman dalam penguatan *digital citizenship*. Nilai kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), toleransi (*tasāmuḥ*), dan ukhuwah menjadi landasan moral dalam penggunaan media digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan warga negara digital tidak hanya bertumpu pada aspek kompetensi digital, tetapi juga pada penguatan karakter dan moralitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jannah et al. (2025) yang menemukan bahwa integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan karakter berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku digital yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Guru juga berperan menanamkan nilai-nilai toleransi, anti-kekerasan, penghormatan terhadap keberagaman, serta sikap adil dan seimbang dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan yang berkembang di ruang digital. Melalui pembelajaran PPKn, guru membimbing peserta didik agar mampu menyaring informasi keagamaan secara kritis, menghindari ujaran kebencian, serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung radikalisme, intoleransi, maupun disinformasi keagamaan. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi sarana memperoleh informasi, tetapi juga menjadi media pembelajaran untuk membangun sikap beragama yang moderat dan inklusif.

Penguatan moderasi beragama melalui *digital citizenship* juga tercermin dalam kemampuan peserta didik untuk berinteraksi secara santun dengan individu dari latar belakang agama, budaya, dan pandangan yang berbeda. Nilai-nilai moderasi beragama seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif

terhadap budaya lokal sejalan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan digital yang menekankan etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain di ruang digital. Oleh karena itu, integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran PPKn menjadi strategi penting untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga mampu menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran guru PPKn dalam penguatan *digital citizenship* bersifat multidimensional, yaitu sebagai fasilitator literasi digital, pembina etika digital, teladan perilaku digital, motivator partisipasi digital, dan penguat nilai-nilai karakter. Temuan ini menguatkan pandangan Fajriyah et al. (2025) bahwa guru pada era digital tidak lagi berfungsi hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi sebagai agen pembentukan karakter kewarganegaraan digital. Hasil penelitian ini juga mendukung Anggraheni et al. (2026) yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan digital sangat dipengaruhi oleh pendampingan, refleksi, dan keteladanan yang diberikan guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, guru PPKn memiliki posisi strategis dalam membentuk warga negara digital yang berkarakter Pancasila, memiliki literasi digital yang baik, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab di ruang digital sekaligus mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Digital Citizenship di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penguatan *digital citizenship* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan efektivitas proses pembentukan warga negara digital yang berkarakter Pancasila. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan penguatan *digital citizenship* di lingkungan sekolah.

1. Faktor Pendukung Penguatan Digital Citizenship

a. Dukungan Kebijakan dan Kultur Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan pendidikan karakter menjadi faktor pendukung utama penguatan *digital citizenship*. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan warga negara digital tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran, tetapi juga pada kultur sekolah yang mendukung internalisasi nilai secara berkelanjutan. Menurut (Capuno et al., 2022), pengembangan *digital citizenship* memerlukan lingkungan pendidikan yang mampu membangun norma, nilai, dan praktik kewarganegaraan digital secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamayel & Hawamdeh (2022) yang menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku kewarganegaraan digital peserta didik.

b. Peran Aktif Guru PPKn

Guru PPKn menjadi faktor pendukung penting karena mampu menghubungkan materi kewarganegaraan dengan realitas kehidupan digital peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penguatan *digital citizenship* sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru mengontekstualisasikan pembelajaran dengan fenomena digital yang aktual. Hasil penelitian ini mendukung pandangan Saez & López (2025) bahwa guru merupakan aktor utama dalam membimbing peserta didik menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab. Temuan ini juga sejalan dengan (Pitriani et al., 2025) yang menegaskan

bahwa transformasi peran guru menjadi fasilitator dan pembimbing digital merupakan prasyarat penting dalam pendidikan kewarganegaraan era digital.

c. Ketersediaan Teknologi dan Akses Informasi

Ketersediaan perangkat digital dan akses internet memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan literasi digital dan partisipasi digital secara lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi merupakan modal penting dalam implementasi *digital citizenship*. Menurut Dulkadir Yaman & Kabakçı Yurdakul (2022), akses terhadap teknologi menjadi salah satu prasyarat utama bagi terbentuknya partisipasi kewargaan digital. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Erdem et al. (2023) yang menunjukkan bahwa akses dan penggunaan media digital secara positif dapat meningkatkan keterlibatan kewargaan peserta didik.

d. Integrasi Nilai Keislaman dan Pancasila

Integrasi nilai keislaman dan nilai Pancasila menjadi faktor pendukung yang memperkuat pembentukan karakter digital peserta didik. Nilai kejujuran, amanah, toleransi, dan ukhuwah memberikan landasan moral dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan *digital citizenship* tidak hanya memerlukan kompetensi digital, tetapi juga fondasi etis yang kuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan M. Rangga & O. Wirian (2025) yang menemukan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku digital yang lebih etis dan bertanggung jawab.

2. Faktor Penghambat Penguatan Digital Citizenship

a. Rendahnya Kemampuan Verifikasi Informasi

Meskipun peserta didik memiliki akses yang luas terhadap informasi digital, sebagian masih mengalami kesulitan dalam memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan mengakses informasi dan kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis. Menurut Gilster (1997), kemampuan evaluasi informasi merupakan inti dari literasi digital. Temuan ini mendukung penelitian Koda & Suharno (2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital meningkatkan kerentanan peserta didik terhadap hoaks dan disinformasi.

b. Pengaruh Lingkungan Media Sosial

Media sosial menjadi tantangan karena peserta didik sering terpapar konten yang mengandung ujaran kebencian, konflik, dan informasi yang tidak terverifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi faktor yang melemahkan internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Isman & Canan Gungoren (2014) yang menjelaskan bahwa penggunaan media sosial tanpa penguatan etika digital berpotensi meningkatkan perilaku digital yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan etika digital secara berkelanjutan dalam pembelajaran PPKn.

c. Kurangnya Pengawasan Penggunaan Teknologi di Lingkungan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua belum mampu melakukan pendampingan digital secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan karakter digital peserta didik tidak dapat dilakukan oleh sekolah secara mandiri. Menurut teori ekologi pendidikan Bronfenbrenner (1994), perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi berbagai lingkungan, termasuk keluarga dan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maghfiroh (2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua berperan penting dalam membentuk perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab pada remaja.

d. Perkembangan Teknologi yang Sangat Cepat

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat menjadi tantangan bagi sekolah dan guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran.

Temuan ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan pendidik dalam memberikan pendampingan yang relevan. Hasil penelitian ini mendukung temuan (Wiwik & Sri Murniyati, 2025) yang menegaskan bahwa kompetensi digital guru harus terus diperbarui agar mampu merespons perubahan teknologi dan kebutuhan peserta didik secara efektif.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan *digital citizenship* merupakan hasil interaksi antara faktor individu, sekolah, keluarga, dan lingkungan digital. Faktor pendukung berupa kultur sekolah, peran guru, ketersediaan teknologi, serta integrasi nilai keislaman dan Pancasila memperkuat proses pembentukan karakter digital peserta didik. Sebaliknya, rendahnya kemampuan verifikasi informasi, pengaruh media sosial, terbatasnya pendampingan keluarga, dan cepatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan yang perlu diatasi. Temuan ini memperkuat penelitian Wahyuni (2026); Koda & Suharno (2025); Maharatu & Marzuki (2026) yang menegaskan bahwa penguatan *digital citizenship* memerlukan ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pembelajaran PPKn dalam membentuk warga negara digital akan semakin optimal apabila didukung oleh lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penguatan digital citizenship melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Al Munawwir Sangatta Selatan telah diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan digital ke dalam proses pembelajaran yang mencakup pengembangan literasi digital, etika digital, tanggung jawab digital, dan partisipasi digital peserta didik. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga melalui pemanfaatan media digital, pembiasaan perilaku bermedia yang bertanggung jawab, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Guru PPKn memainkan peran strategis sebagai fasilitator literasi digital, pembina etika digital, teladan warga negara digital, motivator partisipasi digital, serta penguat nilai-nilai karakter yang menjadi fondasi pembentukan warga negara digital yang berkarakter Pancasila. Keberhasilan penguatan digital citizenship didukung oleh kultur sekolah yang kondusif, peran aktif guru, ketersediaan teknologi, serta integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang menjadi ciri khas SMA Al Munawwir Sangatta Selatan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan berupa rendahnya kemampuan verifikasi informasi pada sebagian peserta didik, pengaruh negatif media sosial, keterbatasan pendampingan digital di lingkungan keluarga, serta cepatnya perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi berkelanjutan dari lembaga pendidikan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan digital citizenship tidak dapat hanya bergantung pada pembelajaran di kelas, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih holistik melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang sehat. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis digital citizenship yang mengintegrasikan literasi digital, etika digital, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai keislaman sebagai kerangka pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan Generasi Z di era transformasi digital. Penguatan digital citizenship melalui pembelajaran PPKn juga berkontribusi pada pembentukan peserta didik yang mampu bersikap toleran, menghargai keberagaman, menolak ujaran kebencian, serta bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan di ruang digital. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama, seperti toleransi (*tasāmuḥ*), keadilan (*i'tidāl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan sikap tengah (*tawassuṭ*), menjadi landasan penting dalam membangun budaya digital yang inklusif dan harmonis.

Dengan demikian, penguatan digital citizenship tidak hanya menghasilkan warga negara digital yang cakap dan bertanggung jawab, tetapi juga mampu menjadi agen moderasi beragama yang berperan aktif dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural pada era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Muhamad Febrian, Muhamad Adip Salikin, Faiq Gibran Abdullah, & Muhammad Nadhif Mirzaq. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Society 5.0: Membangun Warga Negara Humanis-Teknologi: Citizenship Education in the Perspective of Society 5.0: Building Humanistic-Technological Citizens. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5 SE-Articles), 675–686. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/211>
- Aini, N., Ananda, A., Montessori, M., & Indrawadi, J. (2024). Pemanfaatan media online pada generasi Z dalam penyelesaian tugas mata pelajaran PPKn. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3 SE-Articles), 734–743. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.376>
- Al Farizi, I. P., Azly, A. R., & Prasajo, A. D. (2025). Implementasi Pembelajaran Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition Terhadap Siswa Usia SD/MI di Era Digital. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(2), 286–294.
- Alaby, M. A. (2026). Penguatan Etika Digital Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 6(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.54297/seduj.v6i1.1516>
- Aldridge, J. (2023). Socialization and the Normalization of Deviance: A Partial Test of Social Learning Theory. *International Social Science Review*.
- Aliyah, D. Z. hibbatul, Rafi, A., & Razaq, A. (2025). Peran Literasi Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Generasi Z. *Jurnal Literasi Digital*, 5(3 SE-Articles), 311–320. <https://doi.org/10.54065/jld.5.3.2025.794>
- Anggraheni, D., Makarim, S., Anandha, A., & Yogatama, A. (2026). Reinforcing Digital Citizenship Literacy through Exploration and Reflection in Civic Education. *Journal of English Language and Education*, 11(1), 742–750. <https://doi.org/10.31004/jele.v11i1.1796>
- Arbi, Z. F., & Amrullah, A. (2024). Transformasi Sosial dalam Pendidikan Karakter di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Social Studies in Education*, 2(2 SE-Articles), 191–206. <https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.191-206>
- Ayang Afira Anugerahayu, Muhammad Rifaldi Setiawan, Nathania Permata S, Ika Yuliana Susilawati, Ade Sultan Muhammad, & Ahwan. (2026). Peningkatan Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Qur'an Sebagai Wujud Tanggung Jawab Warga Negara Muda. *Kreasi: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2 SE-Articles), 622–632. <https://doi.org/10.58218/kreasi.v6i2.2983>
- Bandura, A. (2024). Social Learning Analysis of Aggression. In *Analysis of delinquency and aggression* (pp. 203–232). Routledge.
- Brandau, M., Dilley, T., Schaumleffel, C., & Himawan, L. (2022). Digital citizenship among Appalachian middle schoolers: The common sense digital citizenship curriculum. *Health Education Journal*, 81(2), 157–169. <https://doi.org/10.1177/00178969211056429>
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological Models of Human Development. *International*

- Encyclopedia of Education*, 3(2), 37–43.
- Capuno, R., Suson, R., Suladay, D., Arnaiz, V., Villarin, I., & Jungoy, E. (2022). Digital citizenship in education and its implication. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(2), 426–437.
- Dikarsa, A. A. (2024). Inovasi Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Aktif dan Kritis. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(3 SE-Articles), 149–157. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i3.595>
- Dulkadir Yaman, N., & Kabakçı Yurdakul, I. (2022). Exploring Parental Mediation of Internet Use Through Young Children's Perspective. *Education and Information Technologies*, 27(6), 7451–7469. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-10939-3>
- Erdem, C., Oruç, E., Atar, C., & Bağcı, H. (2023). The mediating effect of digital literacy in the relationship between media literacy and digital citizenship. *Education and Information Technologies*, 28(5), 4875–4891. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11354-4>
- Fadillah, M., Nurbalqis, A., & Agustina, L. (2022). Pengaruh konten digital terhadap generasi z dalam pemanfaatan media sosial dan digital native di Kota Tanjungpinang. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i2.29>
- Fajriyah, A. R., Ardinary, C., Kasta, M. A., Alwan, M. H., & Nurahma, R. S. (2025). Transformasi Peran Pendidik PPKn di Era Society 5.0 Menuju Pendidikan Humanis dan Digital. *Tumoutou Social Science Journal*, 2(2 SE-Articles), 124–128. <https://doi.org/10.61476/24twya10>
- Febrianti, R., Saputri, L., Nuraini, R., Amanda, S., Mulia, S., Salsabila, S., Rachelia, N., Karamoy, E., & Maryati, S. (2026). Etika dan Keamanan Siber dalam Pembelajaran Digital: Solusi Preventif terhadap Dampak Negatif Internet bagi Siswa. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 6(2), 690–702. <https://doi.org/10.67142/edutik.v6i2.334>
- Gerungan, N., & Tatuhe, N. K. (2023). Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Nutrix Journal*, 7(1 SE-Articles), 35–42. <https://doi.org/10.37771/nj.v7i1.928>
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. Inc. Wiley& Sons.
- Gilster, P., & Glister, P. (1997). *Digital Literacy*. Wiley Computer Pub. New York.
- Hamayel, H. J., & Hawamdeh, M. M. (2022). Methods used in digital citizenship: A systematic literature review. *Journal of Digital Educational Technology*, 2(3), ep2207. <https://doi.org/10.30935/jdet/12520>
- Handayani, F., & Fauzi, F. (2023). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Digital Native Dalam Pencarian Informasi. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 15(1), 31–39. <https://doi.org/10.37108/shaut.v15i1.766>
- Hibbatul Aliyah, D. Z., Rafi, A., & Razaq, A. (2025). Peran Literasi Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Generasi Z. *Jurnal Literasi Digital*, 5(3), 311–320. <https://doi.org/10.65881/creative.v1i2.55>
- Imelda, C., Munandar, A., & Wulandari, N. (2026). Penguatan Literasi Politik Generasi Muda dalam Kebijakan Publik Digital. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 2(1 SE-Articles), 29–44. <https://doi.org/10.63461/kalisa.v2i1.316>
- Isman, A., & Canan Gungoren, O. (2014). Digital citizenship. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 13(1), 73–77.

- Jannah, M., Nur Aini, & Neni, N. (2025). Integrasi Nilai Religius dalam Desain Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi Digital pada Era Society 5.0. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(4 SE-Articles), 63–83. <https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v2i4.296>
- Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1 SE-Articles), 9–14. <https://doi.org/10.69869/54ce0473>
- Khoa, B. T., Hung, B. P., & Hejsalem-Brahmi, M. (2023). Qualitative research in social sciences: data collection, data analysis and report writing. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 12(1–2), 187–209.
- Koda, S. Y., & Suharno, S. (2025). Analysis of the Impact of Digital Literacy Understanding on the Digital Citizenship Behavior of Generation Z Students in the Era of the Industrial Revolution 4.0 (Case Study in the PPKN Undergraduate Program at UNY). *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 5(2), 102–114. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v5i2.1217>
- Kurniawan, M. W., Darmawan, C., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). Analisis Model Literasi Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan Peserta Didik. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).
- Kusumawati, I., Mardianti, D., & Paiman. (2025). Media Pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Academy of Education Journal*, 16(2 SE-Articles), 252–263. <https://doi.org/10.47200/aoej.v16i2.3091>
- Laoli, A., Harefa, A., Lase, F., & Bawamenewi, A. (2024). Pemanfaatan Media Sosial terhadap Kreativitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10 SE-), 11196–11204. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5916>
- Luhukay, M. S., Pakan, N. G., Munthe, Y. R., & Tandrian, I. (2024). Digital Citizenship dan Optimalisasi Teknologi dalam Pembelajaran untuk Siswa SMP dan SMA di Sekolah Lentera Harapan (SLH) Rantepao-Toraja. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 7. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v7i0.2417>
- M. Ranga, P., & O. Wirian. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Digital: Studi Pada SMK Negeri 1 Binjai. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3 SE-Articles), 288–296. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i3.1253>
- Maghfiroh, L. (2023). Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Era Digital. *MAANA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.52166/mjpiaud.v2i2.6211>
- Maharatu, A. P., & Marzuki, M. (2026). Sinergi Tripusat Pendidikan sebagai Strategi Penguatan Karakter Ketaatan dan Kewarganegaraan di Era Disrupsi Digital. *Journal of Moral and Civic Education*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.24036/88514121012026934>
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>
- Masyrofah, S. (2025). Penguatan Literasi Digital Mahasiswa Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila. *Philosophiamundi*, 3(6 SE-Articles), 34–42.

- <https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/169>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications.
- Nakhma'ussolikhhah, Muslimah Muslimah, Shauma Nurul Fauzi, & Ficky Adi Kurniawan. (2025). Pemanfaatan Gadget dalam Mereduksi Perilaku Sosial terhadap Pola Komunikasi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 3(2 SE-Articles), 103–116. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i2.3139>
- Nurmansyah, C. A., Juwono, M. P., & Khairiyah, N. (2026). Literasi Digital Dan Transformasi Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa Dalam Ekosistem Demokrasi Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2 SE-Articles), 6880–6891. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5248>
- Paramitasari, P. N., Antara, I. K. A., Triwijaya, I. N. A., & Werang, B. R. (2025). Problematika Literasi Digital Siswa SMP Negeri 2 Tabanan dalam Penggunaan Media Sosial untuk Pembelajaran. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 6(4 SE-Articles), 692–703. <https://doi.org/10.53299/diksi.v6i4.2976>
- Park, S., Lee, J. Y., Notley, T., & Dezuanni, M. (2023). Exploring the relationship between media literacy, online interaction, and civic engagement. *The Information Society*, 39(4), 250–261. <https://doi.org/10.1080/01972243.2023.2211055>
- Pertiwi, A., Pramudika, N. R., Isnaini, P., & Fikri, R. Ai. (2025). Membangun Literasi Digital Peserta Didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Media Sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1 SE-Articles), 34–41. <https://doi.org/10.61476/trkqkx61>
- Pitriani, H., Handayani, N. F., Hardoko, A., & Majid, N. (2025). Transformasi peran guru PPKn SMP melalui pemanfaatan media Canva: Analisis kerangka TPACK dalam pembelajaran era digital. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 25(2), 272–284. <https://doi.org/10.17509/jpp.v25i2.88600>
- Putra, R. P. (2024). Dampak buruk media sosial bagi perkembangan anak. *Jurnal Teknologi Dan Sains Modern*, 1(4), 158–167. <https://doi.org/10.69930/jtsm.v1i4.249>
- Qowim, A. N., Afif, N., Mukhtarom, A., & Fauziah, E. (2024). Pendidikan Karakter dalam Era Digital: Pengintegrasian Nilai-Nilai Moral dalam Kurikulum Berbasis Teknologi. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.31000/jkip.v6i1.11512>
- Qutub, S. (2025). Pendidikan Karakter: Distrupsi teknologi Sebuah Peluang Tantangan dan Solusi di Dunia Pendidikan. *Akhlak: Journal of Education Behavior and Religious Ethics*, 1(1). <https://doi.org/10.30998/jebg.v1i1.3620>
- Rahmelia, S., Apandie, C., & Nurizka, R. (2026). Penguatan Civic Disposition Melalui Praktik Pedagogik Partisipatif: Analisis Literatur dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 186–196. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n2.p186-196>
- Ribble, M. (2012). Digital Citizenship for Educational Change. *Kappa Delta Pi Record*, 48(4), 148–151. <https://doi.org/10.1080/00228958.2012.734015>
- Ribble, M., & Bailey, G. D. (2011). *Digital citizenship in schools*. International Society for technology in Education Washington, DC.
- Ribble, M., & Park, M. (2019). *The digital citizenship handbook for school leaders*:

- Fostering positive interactions online*. ASCD.
- Römer, L. (2024). *Through Media and Digital Literacy Education Towards Civic Participation of Disadvantaged Youth BT - Digital Inclusion: International Policy and Research* (S. Yates & E. Carmi (eds.); pp. 201–223). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28930-9_10
- Saez, V., & López, K. (2025). Teaching Digital Citizenship in Buenos Aires High Schools. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 55(3), 399–426. <https://doi.org/10.48102/rlee.2025.55.3.824>.
- Salisah, S. K., Darmiyanti, A., & Arifudin, Y. F. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik di era digital tinjauan literatur. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 36–42. <https://doi.org/10.47945/alfikr.v10i1.378>
- Saputra, F. (2024). Pembinaan Karakter Mahasiswa Melalui Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 176–188. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.77>
- Sari, D. I., Mazid, S., & Subowo, A. (2026). Pemaknaan Generative AI dalam Pendidikan: Perspektif Sekolah terhadap Penguatan Kewarganegaraan Digital. *Integralistik*, 37(1), 27–41. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.34244>
- Sumiatun, S. P., Muslim, B., Putri, A. M., & Listyaningsih. (2026). Meningkatkan Literasi Digital dan Ketahanan Terhadap Hoaks Melalui Pembelajaran PPKn: Analisis Civic Knowledge, Skills dan Disposition. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 14(1 SE-Articles), 126–135. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n1.p126-135>
- Supriyanto, A. (2026). Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn untuk Pembentukan Digital Citizenship di Era Society 5.0. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 29–36. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol5.Iss2.2616>
- Susi, Yayuk Muji Rahayu, Nur Amalia Zahra, & Siti Mariyatul Koimah. (2025). Implementasi Artificial Intelligence Terhadap Perkembangan Digital Kewarganegaraan Mahasiswa . *Academy of Education Journal*, 16(1 SE-Articles), 62–72. <https://doi.org/10.47200/aoej.v16i1.2728>
- Tinmaz, H., Lee, Y.-T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00204-y>
- Vallès-Peris, N., & Domènech, M. (2024). Digital citizenship at school: Democracy, pragmatism and RRI. *Technology in Society*, 76, 102448. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102448>
- Vitaharsa, L. I. (2026). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kewarganegaraan Di Era Digital. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4089–4098. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.922>
- Wahyuni, S. (2026). Strategi Pendidikan Karakter di Era Digital : Menanamkan Nilai Moral pada Generasi Z . *JIEL*, 2(01 SE-Articles), 19–36. <https://jurnal.stitau.ac.id/index.php/jiel/article/view/350>
- Webster, J. (2025). Defining digital citizenship and digital citizenship education: a Delphi study. *Journal of Research on Technology in Education*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/15391523.2025.2536564>
- Westheimer, J., & Ladson-Billings, G. (2024). *What kind of citizen?: Educating our*

- children for the common good*. Teachers College Press.
- Wiwik, & Sri Murniyati. (2025). Transformasi Pendidikan: Kebutuhan dan Tantangan Kompetensi Guru dalam Menghadapi Era Digital Abad-21. *JANACITTA*, 8(2 SE-Articles), 359–367. <https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i2.4197>
- Zhong, J., & Zheng, Y. (2023). “What It Means to be a Digital Citizen”: Using concept mapping and an educational game to explore children’s conceptualization of digital citizenship. *Heliyon*, 9(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19291>